

**ANALISIS EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PROGRAM RASKIN
DI KELURAHAN KISARAN BARU KECAMATAN KOTA
KISARAN BARAT KABUPATEN ASAHAN**

TESIS

Oleh

SINTHIYA ARDITA PRATIWI

NPM. 151801127



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan oleh :

N A M A : Sinthiya Ardita Pratiwi

N I M : 151801127

Program : Magister Administrasi Publik

Judul : Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan
Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten
Asahan

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si

Drs. Kariono, MA

Direktur,

Ketua Program Studi ,

Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Dr. W a r j i o, MA

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis

**Program Pascasarjana
Magister Administraasi Publik
Universitas Medan Area**

Pada hari :
Tanggal :
Tempat : Program Pascasarjana MAP-UMA

TIM PENGUJI

Ketua :
Sekretaris :
Pembimbing I : Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si
PembimbingII : Drs. Kariono, MA
Penguji Tamu :

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	12
1.5. Kerangka Penelitian	12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efektivitas.....	13
2.2. Kemiskinan	16
2.2.1 Definisi Kemiskinan	16
2.2.2 Penyebab Kemiskinan	19
2.2.3 Kriteria Kemiskinan	23
2.3. Kebijakan Nasional Program Raskin	25
2.3.1 Konsep Kebijakan Publik.....	25
2.3.2 Latar Belakang Program Raskin.....	27
2.3.3 Program Beras Rakyat Miskin (Raskin).....	28
2.3.4 Sasaran Program Raskin.....	32
2.3.5 tujuan Program Raskin	33

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.2. Bentuk Penelitian	36
3.3. Variabel Penelitian.	37
3.5. Teknik Pengumpulan Data.	38
3.6. Teknik Analisis Data.	38

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Asahan.....	40
4.1.1. Geografi.....	40
4.1.2. Penduduk.....	41
4.2. Pembahasan.....	44
4.2.1. Pelaksanaan Program Raskin.....	44
4.2.2. Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat.....	50
4.2.3. Efektivitas Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat	58
4.2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru.....	71
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran-saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80

A B S T R A K

Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan

Nama: Sinthiya Ardita Pratiwi; NIM: 151801127

Program Raskin adalah program nasional yang bertujuan membantu rumah tangga miskin dalam memenuhi kecukupan kebutuhan pangan dan mengurangi beban finansial melalui penyediaan beras bersubsidi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, Raskin bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Keluarga penerima manfaat Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Informan penelitian adalah Kepala Kelurahan beserta staf dan masyarakat penerima raskin. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisa data yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan tabel tunggal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat yang dilihat dari aspek efektifitasnya, yaitu ukuran keberhasilan pelaksanaan program Raskin 6T, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi dan tepat kualitas, secara umum adalah belum efektif, karena masih ditemukan penerima Program Raskin yang tidak tepat sasaran, tidak tepat harga, tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu. Faktor kunci keberhasilan efektifitas pelaksanaan program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tidak lepas dari nilai dasar pengelolaan yang dikenal dengan istilah “prinsip-prinsip pengelolaan” yaitu Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), Transparansi, Partisipasi, Pengawasan, dan Akuntabilitas.

Keywords: Efektivitas program, Raskin.

A B S T R A C T

Analysis of the Effectiveness of the Implementation of Raskin Program in Kisaran Baru Urban District of West Kisaran City of Asahan Regency

Name: Sinthiya Ardita Pratiwi; NIM: 151801127

The Raskin program is a national program aimed at assisting poor households in meeting the needs of food and reducing the financial burden through the provision of subsidized rice. This program aims to reduce the burden of Household Goal expenditure through the fulfillment of some basic needs in the form of rice. In addition, Raskin aims to increase and open access to family food through the sale of rice to beneficiary families at a predetermined amount. Raskin beneficiaries are low-income families (poor and vulnerable) or referred to as Beneficiary Target Households.

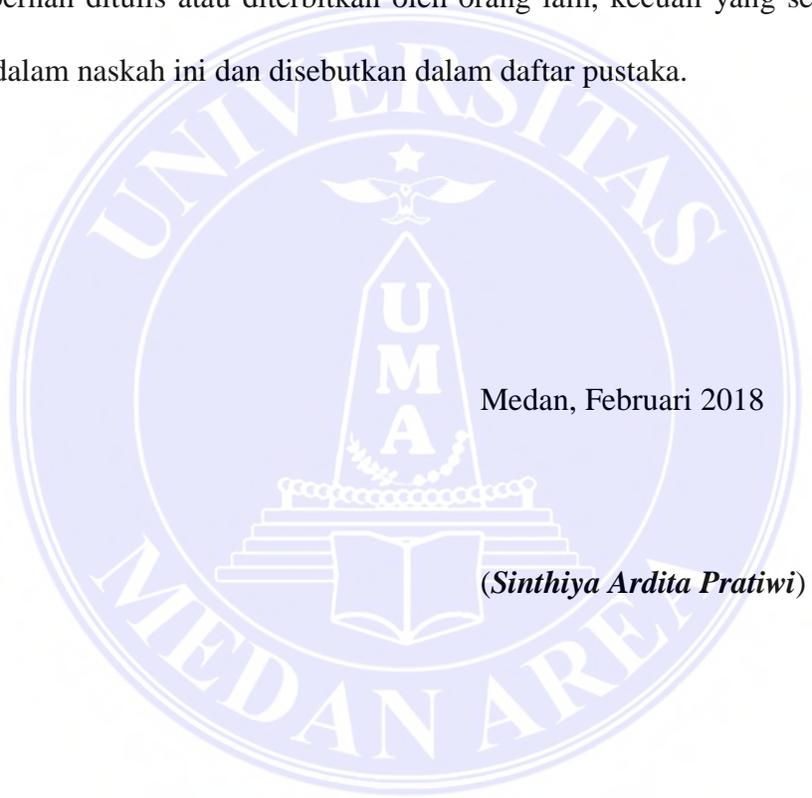
This study aims to analyze the effectiveness of Raskin program implementation in Kisaran Baru Urban District, West Kisaran City, Asahan District. the research informant is the Head of Kelurahan along with the staff and the recipients of raskin. In this research, data analysis technique is descriptive qualitative method, which is a method where the data obtained is compiled and then interpreted so as to provide information on the problems studied by using single table.

The results of this study indicate that the effectiveness of the Raskin program in the Kisaran Baru sub-district of Kota Kisaran Barat City, viewed from the aspect of its effectiveness, namely the successful measure of the implementation of Raskin 6T program, which includes: the right target beneficiaries, the exact amount, the exact price, timely and proper administration appropriate quality, in general is not yet effective, because it is still found Raskin program beneficiaries who are not on target, inaccurate prices, inaccurate amounts and not timely. The key factor for the successful implementation of Raskin program in Kisaran Baru Urban District, West Kisaran City, is not separated from the basic management value known as the "management principles", namely: Participation to Poor Household, Transparency, Participation, Monitoring and Accountability.

Keywords: Effectiveness, Raskin program

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

The logo of Universitas Medan Area is a circular emblem. It features a central tower with the letters 'U', 'M', and 'A' stacked vertically. Above the tower is a five-pointed star. Below the tower is an open book. The entire emblem is surrounded by a circular border containing the text 'UNIVERSITAS MEDAN AREA'.

Medan, Februari 2018

(Sinthiya Ardita Pratiwi)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul ” **Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan**”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

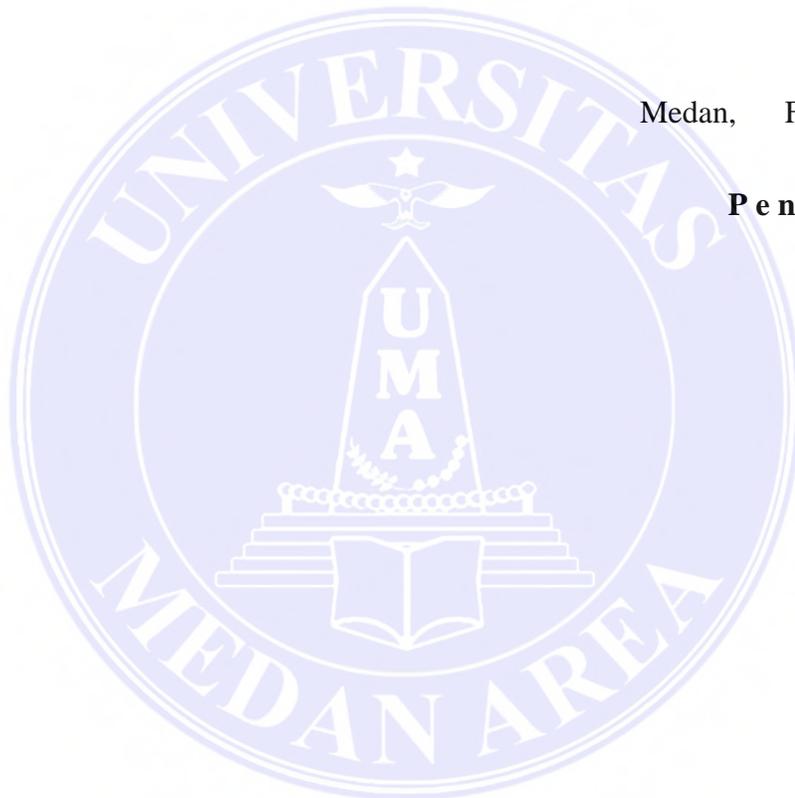
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area,
4. Ibu Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si, sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan dan semangat untuk penyelesaian studi.
5. Bapak Drs. Kariono, MA, sebagai PembimbingII, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Mahmud, SH, Kepala Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan beserta seluruh staf yang telah memberikan ijin penelitian dan informasi dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar khususnya prodi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
8. Terimakasih pula kepada kedua orangtua serta semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do`a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

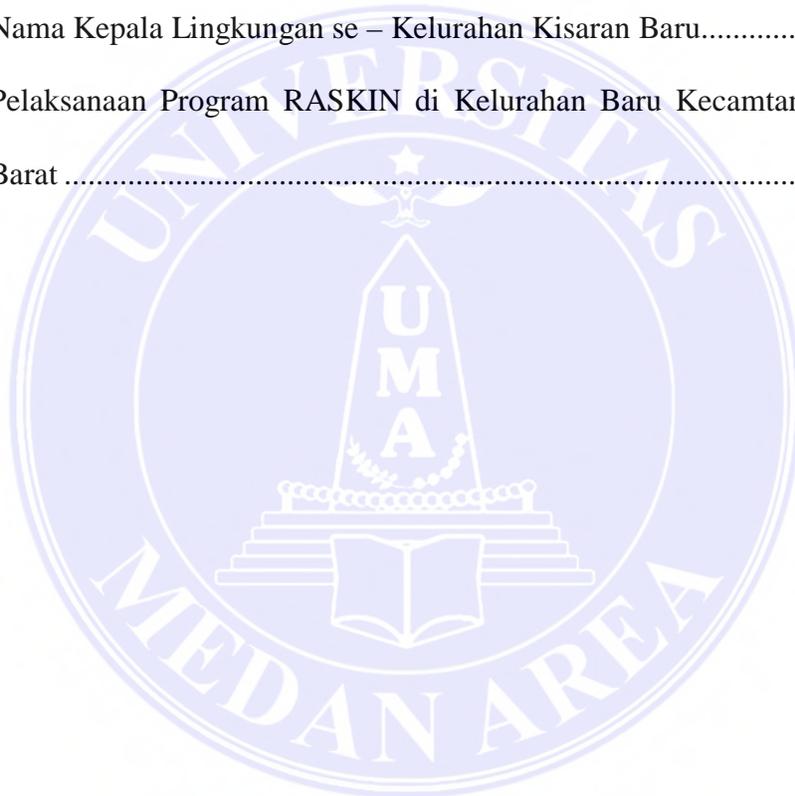
Medan, Februari 2018

Penulis



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Nama-Nama Perangkat Kelurahan Kisaran Baru Kec Kisaran Barat	53
2. Nama Kepala Lingkungan se – Kelurahan Kisaran Baru.....	54
3. Pelaksanaan Program RASKIN di Kelurahan Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Kerangka Teoritis	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan telah menjadi masalah yang serius sejak sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir tahun 1997. Krisis ekonomi memang telah menimbulkan dampak yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dipicu oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, terutama beras. Angka kemiskinan yang ada di Indonesia sekarang ini masih sangat tinggi. Bahkan mengalami peningkatan dari tahun ketahun, menurut data Asian Development Bank (ADB) Tahun 2008 angka kemiskinan Indonesia mencapai 40,4 juta, tahun 2010 mencapai 43,1 juta dan di tahun 2011 bertambah 2,7 juta menjadi 45,8 juta (Smeru, 2015).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). Menurut Kepala BPS Suhariyanto, angka tersebut bertambah 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Meski secara presentase angka kemiskinan mengalami penurunan, namun secara jumlah angka tersebut mengalami kenaikan (Tempo, 2017).

Karena itu, persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang ini bukan lagi mengelola dampak dari krisis ekonomi tetapi lebih pada bagaimana

memberantas kemiskinan. Sejak krisis pangan tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya. OPK memberikan subsidi beras secara target kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada Tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Kemiskinan masih menjadi problem utama bangsa Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015 menunjukkan, 11,22 persen atau sebanyak 28,59 juta orang masih hidup dalam kemiskinan. Padahal, sejak awal dekade 1970-an pemerintah telah gencar melaksanakan berbagai macam program penanggulangan kemiskinan. Akibat adanya kemiskinan, Pemerintah membuat program untuk mengatasi kemiskinan. Program-program yang telah dibuat oleh pemerintah tidaklah sedikit. Program pemerintah yang telah berjalan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program Bantuan untuk Keluarga Miskin (Gakin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sebagainya. Semua itu upaya pemerintah dalam mencoba memerangi kemiskinan. Hal ini berarti pula Pemerintah telah berusaha memikirkan perubahan strategi pembangunannya yaitu salah satunya dengan menggunakan model kebutuhan pokok. Walaupun demikian, program-program tersebut tidak dapat juga mengatasi kemiskinan. Hal ini terlihat dari masyarakat miskin yang tetap pada level yang tinggi.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga negara, maka pemerintah menetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin (Raskin). Penyaluran beras bersubsidi ini telah membantu sebagian besar masyarakat miskin sehingga beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pangan dapat dikurangi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini dibentuk agar keluarga miskin mempunyai akses yang baik terhadap pangan (beras) dalam hal harga dan ketersediaan. Program Raskin sebagai implementasi kebijakan subsidi pangan terarah merupakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial Pemerintah terhadap keluarga miskin. Secara Vertikal, program Raskin akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan rumah tangga. Secara horizontal, Raskin merupakan Transfer Energi yang mendukung program perbaikan gizi, peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Raskin merupakan program bantuan pangan yang sudah dilaksanakan Pemerintah Indonesia sejak Juli 1998 dengan tujuan awal menanggulangi kerawanan pangan akibat krisis moneter 1997/1998. Program ini berlanjut hingga saat ini dengan tujuan utama mengurangi beban rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Program yang sebelum 2002 bernama Operasi Pasar Khusus (OPK) ini awalnya merupakan program darurat bagian dari jaring pengaman sosial (social safety net), namun kemudian fungsinya diperluas menjadi bagian dari program perlindungan sosial,

khususnya program penanggulangan kemiskinan klaster pertama. Sebagai program bantuan beras, Raskin merupakan bagian tak terpisahkan dari program ketahanan pangan, utamanya bagi rumah tangga sasaran. Rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) Raskin adalah rumah tangga miskin (RTM) yang pada kurun waktu 1998 – 2005 didefinisikan sebagai rumah tangga pra sejahtera dan rumah tangga sejahtera 1 alasan ekonomi berdasarkan hasil pendataan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sejak 2006, RTS-PM Raskin didefinisikan sebagai rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 dan hasil verifikasi, yang kemudian diperbarui melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008. Hingga pelaksanaan tahun 2007, RTS-PM Raskin hanya mencakup 47% – 83% dari RTM terdata, dan baru sejak 2008 mencakup seluruh RTM terdata. Pada 2011, RTS-PM Raskin berjumlah 17,5 juta rumah tangga atau mencakup 28,6% dari total rumah tangga di Indonesia.

Melalui program Raskin, setiap RTS-PM dapat membeli sejumlah beras di titik distribusi dengan harga yang lebih murah dari harga di pasaran (bersubsidi). Selama pelaksanaan program, jumlah beras yang dialokasikan untuk setiap RTS-PM mengalami beberapa kali perubahan, namun tetap pada kisaran 10 – 20 kg per distribusi; dan pada 2011 berjumlah 15 kg. Harga beras bersubsidi yang harus dibayar RTS-PM pada awal pelaksanaan program adalah Rp1.000 per kg di titik distribusi. Sejak 2008 harganya dinaikkan menjadi Rp1.600 per kg.

Frekuensi distribusi juga mengalami perubahan antara 10 – 13 distribusi per tahun atau rata-rata satu kali setiap bulan.

Pelaksanaan program Raskin melibatkan berbagai lembaga di semua tingkat pemerintahan, dengan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) sebagai penanggungjawab utama program. Secara teknis, penanggungjawab pelaksanaan distribusi beras sampai dengan titik distribusi (umumnya di kantor desa/kelurahan) adalah BULOG dan penanggungjawab untuk menyampaikan beras dari titik distribusi ke setiap RTS-PM adalah Pemerintah Daerah. Namun, sebagai satu entitas program, sosok Program Raskin secara keseluruhan jauh lebih kompleks dari gambaran mekanistik tersebut. Di dalamnya antara lain melibatkan dimensi hubungan antar lembaga dan antar tingkat pemerintahan, finansial, dan prosedur administratif.

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan

Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan.

Beras merupakan bagian terbesar dalam pengeluaran rumah tangga keluarga miskin, dimana keluarga miskin penerima beras miskin (raskin) dapat merelokasikan anggaran rumah tangga untuk jumlah makanan yang lebih banyak dan atau mutu makanan yang lebih berkualitas serta pendidikan dan kesehatan dengan lebih baik. Melalui pemberian raskin, ketidakpastian konsumen miskin akan berkurang dan diharapkan akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja keluarga karena kualitas sumberdaya manusia keluarga miskin rawan pangan menjadi lebih baik.

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di desa/ kelurahan/pemerintahan setingkat.

Raskin merupakan subsidi pangan pokok dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan pada keluarga miskin. Beras merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2002 pemerintah Indonesia meluncurkan Program

Raskin yang merupakan implementasi dari konsistensi pemerintah dalam rangka memenuhi hak pangan masyarakat. Program semacam ini sebenarnya sudah ada sejak krisis pangan di Indonesia pada tahun 1998 yang dinamakan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK). Namun, baru pada tahun 2002 program OPK ini diubah namanya menjadi program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah (Raskin). (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2016:1)

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, Raskin bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2016)

Keluarga penerima manfaat Raskin yaitu keluarga yang berpendapatan rendah (miskin dan rentan miskin) atau disebut dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). RTS-PM Raskin ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2016). Raskin merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Kota Kisaran Barat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Asahan. Kecamatan terdiri dari 13 Kelurahan dan 74 Lingkungan dengan luas 32,96 Kilometer dan berpenduduk sebesar 62.917 jiwa, di kecamatan ini terdapat Masjid yang sangat besar dan luas areanya yaitu Masjid Agung H. Ahmad Bakrie dan Tugu Adipura Didepannya, di Kecamatan ini juga terdapat Sekolah Perguruan Swasta Diponegoro, Rumah Dinas Bupati Asahan, Alun-Alun Rambate Rata Raya dan Kantor Bupati Asahan, terdapat juga sebuah lapangan golf yang sangat luas areanya yang ramai didatangi pada saat hari libur.

Mekanisme pembagian Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan dimulai dengan pengiriman beras yang berasal dari Perum Bulog ke Kantor Kecamatan Kota Kisaran Barat lalu didistribusikan ke Kantor Kelurahan Kisaran Baru, dan kemudian Raskin tersebut disalurkan kepada warga. Namun, beras yang diterima oleh masyarakat miskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan karena terjadi penyusutan. Penyusutan ini disebabkan karena adanya keterlambatan pengiriman, umumnya keterlambatan terjadi dikarenakan belum diterbitkannya surat ketetapan pagu penerimaan Raskin di Asahan dari Biro Perekonomian Provsu di Medan.

Dalam pelaksanaan program Beras miskin kerap kali terjadi penyimpangan ataupun masalah-masalah yang dihadapi pelaksana maupun masyarakat miskin sebagai penerima beras miskin. Salah satunya ialah masih banyaknya

masyarakat yang sejahtera tetapi tetap mendapatkan beras miskin, sedangkan masyarakat yang betul-betul dalam kategori miskin tidak merasakan program ini. Hal ini dikarenakan data dari kantor statistik yang diterima Kelurahan ataupun Kecamatan merupakan data lama (belum diperbaharui) sehingga tidak akurat untuk keadaan sekarang. Dimana ada masyarakat yang telah sejahtera, tetap menerima beras miskin dikarenakan data yang diterima mengatakan bahwa masyarakat tersebut masih dalam kategori miskin. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa program beras miskin ini merupakan program Kelurahan, bukan program dari Pemerintah pusat. Sehingga mereka datang ke kantor Kelurahan untuk meminta jatah beras miskin walaupun nama mereka tidak terdaftar sebagai penerima beras miskin. Hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya sosialisasi mengenai beras miskin ini kepada masyarakat khususnya di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat, Permasalahan lainnya ialah pendistribusian beras miskin kepada masyarakat yang kadang terlambat dikarenakan tidak adanya jadwal yang pasti mengenai datangnya beras miskin ini dari BULOG.

Oleh karena itu efektivitas pelaksanaan Raskin tidak bisa dilihat secara parsial hanya berdasarkan pada kinerja instansi tertentu saja. Hal tersebut sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) Raskin 2011 yang menyatakan bahwa indikator kinerja Program Raskin adalah tercapainya target “Enam Tepat”. yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk tugas akhir dengan judul :”**Analisis Efektifitas Pelaksanaan Program Raskin Di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana efektifitas pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan?
- 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

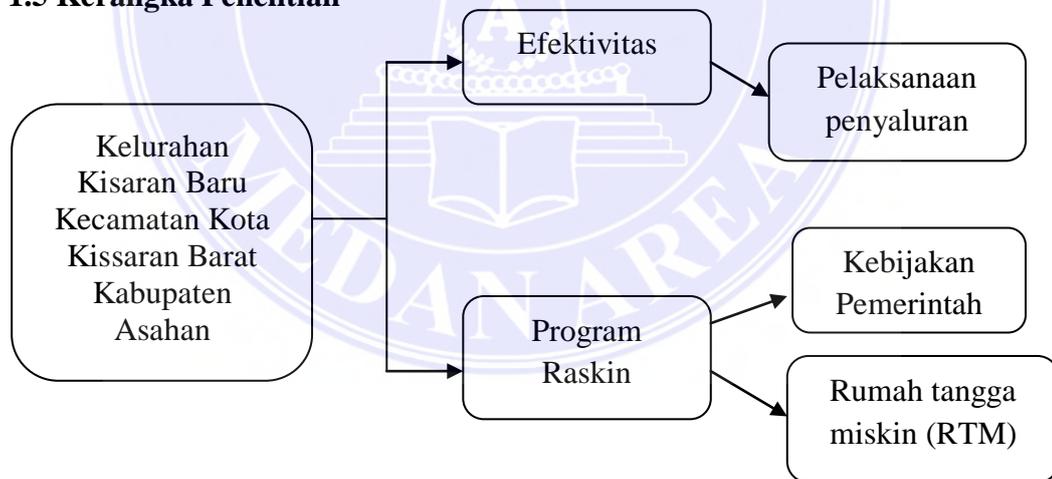
- a. Untuk menganalisis efektifitas pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat pada berbagai pihak, adapun manfaat hasil penelitian ini adalah:

- 1) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program Raskin.
- 2) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khasanah pengetahuan administrasi publik khususnya yang berkaitan dengan penelitian di bidang kebijakan dan manajemen publik.

1.5 Kerangka Penelitian



Gambar .1.1 Kerangka teori

Permasalahan yang dilihat yakni, bagaimana proses pelaksanaan penyaluran beras miskin (Raskin) kepada rumah tangga miskin (RTM) penerima manfaat sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handayani (1994:16) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Gibson et.al (2002:23) efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati bersama; Steers (1985:46) efektivitas adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai sasaran. Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu tingkat keberhasilan dari pelaksanaan suatu kegiatan organisasi sesuai dengan tugas pokoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis yaitu: (1) individu, (2) kelompok, dan (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan organisasi.

Pencapaian hasil (efektivitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi menurut Jones (1994) terdiri dari tiga tahap, yakni masukan (input), proses

(conversion), dan keluaran (output) atau hasil. Input meliputi semua sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Dalam tahap input, tingkat efisiensi sumber daya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimiliki. Tahap proses (*conversion*) ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai.

Dalam tahap ini, tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan tingkat produktifitasnya. Sedangkan dalam tahap keluaran (output), pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan atau pengguna.

Adapun pengukuran terhadap konsep efektivitas menurut Campbell (1989:121) adalah Keberhasilan program; keberhasilan sasaran; kepuasan terhadap program; efisiensi; pencapaian tujuan. Salah satu faktor yang dapat mendorong peningkatan efektivitas pengelolaan program Raskin, selain penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar dan konsisten, juga harus mempertimbangkan beberapa nilai dasar yang dikenal dengan istilah “prinsip-prinsip pengelolaan”.

Adapun Prinsip pengelolaan program Raskin adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian

kegiatan RASKIN. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan RASKIN, yaitu : Keberpihakan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), yang maknanya mendorong RTM untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan RASKIN baik di desa dan kecamatan, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

Transparansi, yang maknanya membuka akses informasi kepada lintas pelaku RASKIN terutama masyarakat penerima RASKIN, yang harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan RASKIN serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri. Partisipasi, yang maknanya mendorong masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan RASKIN, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pengawasan, yang maknanya tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan organisasi untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya dan melakukan tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan yang ada sebelumnya. Akuntabilitas, yang maknanya mengingatkan bahwa setiap pengelolaan kegiatan RASKIN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

Kaitannya dengan pengelolaan program Beras Miskin (RASKIN), maka yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah dengan mengukur indikator

keberhasilan pelaksanaan program Raskin adalah tepat sasaran penerima manfaat, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi.

1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat;

RASKIN hanya diberikan kepada RTM penerima manfaat Raskin hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1 dan diberi identitas (Kartu RASKIN atau bentuk lain).

2) Tepat kualitas;

beras raskin yang disalurkan harus beras yang berkualitas dan tidak berbau.

3) Tepat Jumlah;

Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 15 Kg/RTM/bulan selama 12 bulan sesuai dengan hasil musyawarah desa.

4) Tepat Harga;

Harga beras RASKIN adalah sebesar 1.600 rupiah per Kg netto di titik distribusi.

5) Tepat Waktu;

Waktu pelaksanaan Distribusi beras RASKIN kepada RTM Penerima Manfaat Raskin (PMR) sesuai dengan Rencana Distribusi.

6) Tepat Administrasi;

Terpenuhinya persyaratan Administrasi secara benar dan tepat waktu. Untuk mencapai efektivitas penyaluran Raskin, maka mekanisme pelaksanaannya perlu diatur dengan baik sebagaimana dikemukakan dalam buku Pedoman Umum "Raskin" (Beras Untuk Rumah Tangga Miskin) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2011.

2.2. Kemiskinan

2.2.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di berbagai negara berkembang, mencakup lebih dari satu miliar penduduk dunia, terutama di daerah pedesaan (masyarakat petani). Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, tetapi juga mengandung suatu resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. Secara ekonomi kemiskinan dikaitkan dengan masalah pendapatan. Karena pengertian ini tidak mampu menjelaskan masalah kemiskinan secara tuntas maka kemiskinan didefinisikan secara plural. Sebagai suatu proses kemiskinan mencerminkan kegagalan suatu sistem masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya dan dana secara adil kepada anggota masyarakat (Hermanto.H.S.Dillon,1993).

Sementara Chambers menggambarkan kemiskinan, terutama di pedesaan mempunyai lima karakteristik yang saling terkait : kemiskinan material, kelemahan fisik, keterkucilan dan keterpencilan, kerentanan dan ketidak berdayaan. Kerentanan menurut Chambers (1983) dapat dilihat dari ketidakmampuan keluarga miskin untuk menyediakan sesuatu guna menghadapi situasi darurat seperti datangnya bencana alam, kegagalan panen atau penyakit yang tiba-tiba menimpa keluarga miskin itu. Kerentanan dapat juga dikatakan merupakan kondisi di mana suatu keluarga miskin tidak memiliki kesiapan baik mental

maupun material dalam menghadapi situasi sulit yang dialaminya. Kerentanan ini sering menimbulkan kondisi memprihatinkan yang menyebabkan keluarga miskin harus menjual harta benda dan aset produksinya sehingga mereka makin rentan dan tidak berdaya. Sedangkan ketidakberdayaan keluarga miskin salah satunya tercermin dalam kasus dimana elite desa dengan seenaknya memfungsikan diri sebagai oknum yang menjaring bantuan yang sebenarnya diperuntukan untuk orang miskin contohnya seperti kasus bantuan langsung tunai (BLT). Sedangkan menurut Schiller menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas (Soetrisno,2001), dan dengan nada yang sama Salim mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Andre Bayu Ala,1981).

Pengertian kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi tiga pengertian :

- a) Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang timbul karena pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang, pangan
- b) Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c) Kemiskinan kultural adalah suatu kemiskinan yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Kemiskinan telah berdampak pada jatuhnya kualitas hidup manusia secara total ditandai dengan sempitnya nalar, egoisme atau ingin menang sendiri. Setiap masalah kemasyarakatan cenderung sering diselesaikan dengan adu otot, kekerasan dan mengerahkan massa (Asy'arie, 2001). Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumberdaya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi (Basri, 2002).

Menurut Adelman, di daerah perkotaan mayoritas kaum miskin adalah pekerja-pekerja tidak terlatih di sektor jasa-jasa. Para pekerja di sektor manufaktur (industri pengolahan), apakah mereka itu terlatih atau tidak, merupakan bagian 20-40 persen penduduk yang paling kaya. Jadi tenaga kerja tidak terlatih merupakan milik utama kaum miskin dan yang menentukan arah kemiskinan adalah adanya permintaan akan produktivitas dari tenaga kerja mereka itu (Goudzwaard dan Lange, 1995). Menurut BPS pengertian kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makananya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. Sedangkan kemiskinan menurut definisi BKKBN adalah keluarga Pra Sejahtera yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

2.2.2 Penyebab Kemiskinan

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni a. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. b. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang terjadi dikarenakan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin

Perlu disadari bahwa lembaga-lembaga dalam pasaran faktor dan produk merupakan penentu-penentu penting mengenai bagaimana pembangunan mempengaruhi kaum miskin. Perubahan struktural yang bertalian dengan pembangunan menimbulkan proses-proses yang sekaligus meningkatkan penyerapan sebagian tenaga kerja dan faktor lain, serta menimbulkan relokasi-relokasi geografis dan sektoral bagi digunakannya tenaga kerja dan faktor lain. Bagaimana proses-proses penyerapan, penggantian dan retribusi angkatan kerja “hasilnya bersihnya” berpengaruh pada kaum miskin, tergantung pada struktur kelembagaan daripada pasaranpasaran faktor dan produk (Lewis dan Kallab,1987). Itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan melulu terfokus pada pertumbuhan daripada pemerataan.

Kebijakan yang terfokus pada pertumbuhan tersebut akhirnya mengabaikan pemerataan pendapatan yang menciptakan ketimpangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Seperti dalam paradok kemiskinan, bahwa “kemiskinan meningkat tajam ditengah masyarakat yang kaya” (Goudzwaard dan

Lange, 1995). Kemiskinan meningkat secara tajam tepat ditengah masyarakat yang kaya. Ajaran teori lama bahwa pemerataan akan dengan sendirinya makin baik setelah mencapai tingkat pembangunan tertentu (trickle down effect), dan untuk mengejar pertumbuhan cepat, pemerataan harus dikorbankan dahulu sudah usang dikalangan perencana ekonomi pembangunan kontemporer. Banyak yang mengkhawatirkan efek trickle down karena berbagai sebab, tidak bisa otomatis terealisasi dan yang terjadi justru sebaliknya, trikle up, karena dalam kondisi surplus tenaga kerja, buruh gaji sangat rendah, dan usaha kecil selalu kalah dalam tawar menawar.

Di pihak lain, akibat majunya komunikasi massa global, adanya kemiskinan dan ketidakmerataan ditengah kemajuan ekonomi, akan membawa dampak sosial politik yang justru sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan. Demonstration effect dari pembangunan ekonomi negara-negara lain besar pengaruhnya bagi pembangunan suatu negara. Karena itu isu kemiskinan dan ketimpangan harus ditangani sejak awal (Pangestu dan Setiati, 1997). Pendapat senada dikemukakan oleh Adelman mengenai arah pembagian pendapatan selama proses pembangunan. Yang menyatakan bahwa, apa yang terjadi pada kemiskinan dalam perjalanan waktu ditentukan oleh tingkat pertumbuhan pendapatan total dan oleh perubahan-perubahan pada bagian yang diperoleh kaum miskin dari pendapatan itu. Jika bagian yang diperoleh kaum miskin turun lebih cepat dari peningkatan keseluruhan pendapatan itu, kaum miskin rugi oleh pertumbuhan itu, selain itu mereka untung. Maka bagaimana

pendapatan kaum miskin itu berubah dengan pembangunan ekonomi, amat penting untuk memahami masalah kemiskinan dan pemberantasannya.

Tahap-tahap awal dari proses pembangunan itu, selama perekonomian yang kebanyakan bersifat agraris muali dengan industrialisasi, hampir selalu ditandai dengan kenaikan-kenaikan yang cukup besar dalam ketidaksamaan dalam pembagian pendapatan. Bagian-bagian yang diterima oleh golongan termiskin merupakan seperlima, dua perlima dan tiga perlima dari jumlah penduduk semuanya turun dengan tajam karena diciptakannya suatu pulau kecil yang berpenghasilan tinggi ditengah lautan besar orang-orang yang berpenghasilan rendah.

Tahap-tahap selanjutnya dari proses pembangunan itu ditandai dengan naiknya bagian pendapatan yang diperoleh mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi modern berpenghasilan tinggi, suatu pelebaran kesenjangan pendapatan antara sektor berpenghasilan tinggi dan sektor berpenghasilan rendah dalam perekonomian itu dan peningkatan dalam ketidaksamaan, baik dalam sektor yang berpenghasilan tinggi maupun dalam sektor yang berpenghasilan yang rendah. Perpindahan penduduk dari sektor yang berpenghasilan rendah ke sektor berpenghasilan yang tinggi merupakan yang mengurangi ketidaksamaan itu. Dipihak lain, meningkatnya rata-rata diferensial pendapatan diantara sektor-sektor merupakan faktor-faktor yang menciptakan ketidaksamaan yang lebih besar. Secara keseluruhan, kecenderungan adalah meningkatnya ketidaksamaan, paling tidak untuk sementara. Berbagai simulasi telah mengesankan bahwa

meningkatnya ketidaksamaan ini akan cenderung berlanjut sampai sedikitnya separuh penduduk berada di sektor berproduksi tinggi.

Tidak ada kecenderungan dengan sendirinya untuk membaiknya pembagian pendapatan itu, selagi negara-negara memasuki tahap terakhir dari peralihan mereka ke status sebagai negara industri. Naik tidaknya ketidaksamaan itu tergantung pada kebijakan-kebijakan yang ditakuti negaranegara itu. Khususnya, hal itu tergantung pada sejauh mana kebijakankebijakan yang diikuti itu mempersempit kesenjangan antara sektor-sektor itu, sejauh mana mereka mengurangi penyebaran pendapatan dalam sektor modern yang relatif cepat penyerapan ke dalam sektor modern. Jadi, bentuk pola bagian pendapatan yang diperoleh mereka yang termiskin sebagai fungsi daripada pembangunan dapat berbentuk U, seperti dihipotesiskan oleh Simon Kuznets dari membandingkan sampel negara-negara maju dengan negaranegara berkembang berpendapatan sedang sampai tinggi, atau huruf J tergantung pada sifat strategi pembangunan yang dipilih (Goudzwaard dan Lange, 1995).

Sharp mencoba mengidentifikasi ada tiga penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi yaitu :

- a) Secara mikro kemiskinan muncul karena pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitas rendah.
- b) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendah kualitas sumber daya ini karena

rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

c) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

2.2.3. Kriteria Keluarga Miskin

Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan. Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin. Badan Pusat Statistik memberikan 14 kriteria yang menjadikan sebagai indikator keluarga miskin sebagai berikut : (<http://www.BSPusat.com>)

1. Luas lantai bangunan tempat kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerja lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,00 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD dan hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual, seperti: sepeda motor, (kredit atau non kredit), emas, ternak, atau barang modal lainnya

2.3. Kebijakan Nasional Program Raskin

2.3.1. Konsep Kebijakan Publik

Hessel Nogi S. (2000: 1-3) Kebijakan publik sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri memperlihatkan tiga tampilan dalam cakupan studinya yaitu menentukan arah umum yang harus ditempuh untuk mengelola isu-isu yang ada di tengah masyarakat, menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi pemerintah, dan mengetahui betapa luas dan besarnya organisasi birokrasi publik ini. Kemampuan analisis kebijakan publik amat bergantung pada objektivitas dan keakuratan informasi, serta kepekaan seorang analisis untuk menempatkan masalah publik secara proporsional dengan memperhatikan semua *stakeholders* yang terlibat. Kepekaan ini perlu diasah melalui pendalaman kasus-kasus kebijakan publik yang terjadi pada masyarakat sekitar dengan memperhatikan faktor rasionalitas serta wacana publik secara kontekstual. N. Dunn, menyatakan bahwa kebijakan publik (*Public policy*) adalah “Pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (N. Dunn, 2000:132).

Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah. Dapat dirumuskan pula bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab,

konsekuensi, dan kinerja kebijakan dan program publik (Inu Kencana Syafiie, 1999:106).

Menelusuri pengertian kebijakan, pertama kebijakan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bijaksana yang artinya: (1) selalu menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuan), arif, tajam pikirannya; (2) pandai dan ingat-ingat dalam menghadapi kesulitan (cermat; teliti). Pengertian kebijakan sendiri adalah; (1) kepandaian, kemahiran; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi); penyertaan cita-cita, tujuan, prinsip dan maksud. Sementara itu pengertian publik yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti negara atau pemerintah. Kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

Anderson dalam bukunya Kebijakan Publik (2004 : 114) memberi makna tentang Kebijakan Publik sebagai berikut :

1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan;
2. Kebijakan tersebut berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat pemerintah;
3. Kebijakan tersebut merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan atau menyatakan sesuatu;
4. Kebijakan publik tersebut dapat bersifat positif, dalam arti berupa tindakan untuk mengatasi masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam

arti merupakan suatu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu apapun.

5. Kebijakan publik didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Dalam kaitannya dengan Program Raskin, maka makna atau pengertian kebijakan dalam hal ini salah satunya adalah upaya yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menerbitkan kebijakan yang tertuang dalam Inpres No 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh pemerintah untuk masyarakat miskin. Program raskin ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin melalui penyediaan beras yang bersubsidi yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya sebagai salah satu hak dasar masyarakat. Dalam pelaksanaan beserta penyaluran raskin didasarkan pada suatu panduan berupa Pedoman Umum (Pedum) raskin tahun 2015 yang didalamnya berisi Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) beserta Juklis (Petunjuk Teknis) program raskin

2.3.2. Latar Belakang Sejarah Program Raskin

Penyaluran RASKIN (bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat miskin) sudah dimulai sejak tahun 1998. Sebelumnya pada tahun 1997 telah terjadi kemarau panjang, serangan hama wereng dan belalang, harga pupuk dan pestisida naik, kemudian disusul dengan terjadinya krisis moneter dan ekonomi, serta Instabilitas politik di negeri ini. Baru pada tahun 1998 terjadilah yang

namanya Krisis Pangan, yakni dengan naiknya harga-harga kebutuhan pangan, sehingga daya beli masyarakat turun.

Jadi boleh dibilang krisis moneter tahun 1998 dengan berbagai dampak ikutannya itulah, merupakan awal dari pelaksanaan Kebijakan Program RASKIN. Kebijakan Program Raskin ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin, atau dengan kata lain bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam mengakses kebutuhan pangan pokok beras. Pada awalnya Program Raskin ini disebut dengan: Program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, dimana Program RASKIN diperluas fungsinya, tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*), melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial (*social protection*) masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN itu sendiri.

2.3.3 Program Beras Rakyat Miskin (Raskin)

Beras bersubsidi atau beras miskin adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. atau bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. (<http://www.bulog.co.id>, Raskin). Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa merubah istilah beras miskin (raskin) menjadi beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Raskin sendiri hanya sebuah ikon dan tidak lagi dijadikan akronim "beras untuk masyarakat miskin". Usulan perubahan ini sendiri, sesungguhnya telah dibahas beberapa tahun silam, karena makna "beras untuk

masyarakat miskin" dinilai sangat merendahkan martabat yang menerimanya. Oleh sebab itu kita harus dan mendukung dengan apa yang telah diputuskan oleh Pemerintah.

Kebijakan pangan merupakan suatu kebijakan di bidang pangan atau disebut juga dengan kebijakan perberasan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas atau lebih dikenal dengan strategi swasembada bahan pangan sambil memanfaatkan perubahan teknologi dalam bidang pertanian. Selain itu, terdapat kebijakan-kebijakan yang penting dalam kebijakan pangan yang meliputi: intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas agar pertanian di Indonesia menjadi lebih berkembang dan produksinya menjadi berlimpah, serta petani mendapat keuntungannya. Penyaluran raskin sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan akan menjadi lebih tepat sasaran dan mencapai tujuan RASKIN Penentuan kriteria penerima manfaat RASKIN seringkali menjadi persoalan yang rumit. (<http://www.bulog.co.id>, Raskin)

Secara vertikal program Raskin bukan semata-mata program pusat semata, akan tetapi Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab secara

proporsional. Dalam hal ini Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan nasional, sedangkan dalam pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran Pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan subsidi pembelian beras yang di laksanakan oleh Perum BULOG di salurkan sampai titik distribusi(TD) untuk selanjutnya Pemerintah daerah menyampaikan beras tersebut kepada RTS-PM dengan 6 tepat (tepat sasaranm tepat jumlah, tepat mutu , tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi) oleh karena itu pelaksanaan program Raskin sangat tergantung pada peran Pemerintah daerah seperti sosialisasi, pengawasan mutu, angkutan dan biaya operasional antara lain sebagai berikut : (Panduan Raskin, 2016: 32)

- a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat adalah rumah tangga miskin di Desa atau Kelurahan yang berhak menerima Raskin dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) yang di tetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah sebagai hasil dari musyawarah Desa/ Kelurahan dan di sahkan oleh Camat sesuai dengan pendapatan.
- b. Musyawarah Desa/ Kelurahan merupakan forum pertemuan musywarah di tingkat Desa/ Kelurahan yang melibatkan aparat Desa/ Kelurahan. Dan perwakilan RTS-PM Raskin di setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
- c. Titik distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari satker Raskin kepada pelaksana distribusi Raskin di tingkat Desa/ Kelurahan atau lokasi yang di sepakati secara tertulis oleh Pemerintahan Kabupaten/ Kota dengan drive/subdrive/ kansilog Perum BULOG.

- d. Titik bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari pelaksana distribusi Raskin kepada RTS-PM.
- e. Pelaksana distribusi Raskin adalah kelompok kerja (Pokja) di TD yang di tetapkan oleh kepala Desa/ Lurah.
- f. Kelompok kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/ Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/ Kelurahan, ketua RT/RW/RK dan beberapa orang di tunjuk oleh di tetapkan oleh kepala Desa/ Lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
- g. Padat karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang di kaitkan dengan pemberdayaan masyarakat di mana para RTS-PM diwajibkan bekerja dan meningkatkan produktivitas daerah dengan di berikan kompensasi pembayaran HBD Raskin oleh Pemerintah daerah melalui APBD.
- h. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang di bentuk oleh divisi regional (Divre)/ sub divisi regional(subdrive) kantor seksi logistic(kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang di angkat dengan surat perintah (SP) Kadivre/ KasubKadivre/Kakansilog.
- i. Kualitas beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang di atur dalam inpres kebijakan perberasan yang berlaku.
- j. SPA adalah surat Pemerintahan alokasi yang di buat oleh Bupati/ Walikota atau ketua tim Koordinasi RaskinKab/ Kota atau pejabat yang di tunjuk oleh Bupati/ Walikota kepada Kadivre/ Kasubdivre/ Kakansilog berdasarkan

alokasi Pagu Raskin dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- k. Surat perintah penyerahan barang (SPPB) /delively order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivire/Kasubdivire/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada kepala gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- l. BAST adalah Berita Acara Serah Serima Beras berdasarkan SPA dari Bupati/ Walikota dan di tanda tangani antara Perum BULOG dan pelaksana distribusi.

2.3.4. Sasaran Program Raskin

Penentuan kriteria penerima manfaat RASKIN seringkali menjadi persoalan yang rumit. Dinamika data kemiskinan memerlukan adanya kebijakan lokal melalui musyawarah Desa/Kelurahan (Mudes/Muskel). Musyawarah ini menjadi kekuatan utama program untuk memberikan keadilan bagi sesama rumah tangga miskin (RTM). Sampai dengan tahun 2006, data penerima manfaat RASKIN masih menggunakan data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yakni: data keluarga pra-sejahtera alasan ekonomi, dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi. Belum seluruh Kepala Keluarga (KK) Miskin dapat dijangkau oleh Program RASKIN. Hal inilah yang menjadikan RASKIN sering dianggap tidak tepat sasaran, oleh karena (ada sebagian) para rumah tangga sasaran (RTS) berbagi dengan KK Miskin lain yang belum terdaftar sebagai rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin (RTS-PM Raskin).

Mulai tahun 2007, digunakan data Rumah Tangga Miskin (RTM) BPS sebagai data dasar dalam pelaksanaan Kebijakan Program RASKIN. Dari jumlah RTM yang tercatat pada saat itu, sebanyak 19,1 juta RTS, Raskin baru dapat diberikan kepada 15,8 juta RTS (82,72%). Kemudian Raskin baru dapat diberikan kepada seluruh RTM (100%) pada tahun 2008. Dengan jumlah RTS sebanyak 19,1 juta pada tahun 2008, berarti telah mencakup semua rumah tangga miskin yang tercatat dalam Survei BPS tahun 2005 (PSE-'05). Jumlah sasaran ini juga merupakan sasaran tertinggi selama RASKIN disalurkan. Penggunaan data Rumah Tangga Sasaran (RTS) hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2008 (PPLS-'08) dari BPS diberlakukan sejak tahun 2008 yang juga berlaku untuk semua program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

2.3.5. Tujuan Program Raskin

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, atau yang biasa disebut dengan Program Raskin, tujuan utamanya atau tujuan awalnya adalah: untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam memenuhi kebutuhan pangan beras. Sedangkan kalau Cadangan Beras Pemerintah (CBP) disediakan oleh Pemerintah Pusat untuk antisipasi atau menjaga stabilitas harga beras, penanggulangan keadaan darurat bencana dan rawan pangan, bantuan atau kerjasama internasional serta keperluan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah. (CBP).Namun untuk pelaksanaa kebijakan pengadaan dan penyaluran beras baik Raskin maupun CBP, dilakukan oleh Perum BULOG. Kewenangan pengadaan beras, dan penentuan harga pembelian

pemerintah (HPP), maka kewenangannya ada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan Nasional (terakhir Inpres No. 3/thn 2012) mengamanatkan bahwa Pengadaan gabah/beras oleh Pemerintah (khususnya untuk Raskin dan CBP) dilakukan dengan mengutamakan pengadaan gabah/beras yang berasal dari pembelian gabah/beras petani dalam negeri. Adapun tujuan lain dari Program Raskin atau *multiplier effect* (dampak) Kebijakan Program Raskin ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketahanan Pangan di tingkat RTS, sekaligus mekanisme Perlindungan Sosial.
- 2) Stabilisasi Harga Beras: karena setiap bulannya Raskin digelontorkan sebanyak sekitar 233 ribu Ton (tahun 2013 – 2015), sehingga cukup efektif untuk meredam harga beras di pasaran.
- 3) Membantu Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Mengurangi Beban pengeluaran RTS: dari hasil kajian terungkap bahwa dengan diberikan Raskin, maka RTS berkurang beban pengeluarannya untuk membeli pangan beras, sebanyak 39,5%.
- 4) Pengendalian Inflasi melalui harga beras bersubsidi (sejak thn 2008 – 2015, Harga Tebus Raskin sebesar Rp1.600,-/kg).
- 5) Menjaga Stok Pangan Nasional.
- 6) Akses pangan kepada RTS. (7) Sebagai Pasar (*outlet*) bagi Hasil Usaha Tani Padi.
- 7) Menggerakkan Perekonomian di daerah
- 8) Menghemat pendapatan yang terbatas bagi RTS.

9) Mencegah Rawan Pangan dan Malnutrisi.

Dari beberapa tujuan Kebijakan Program Raskin sebagaimana tersebut di atas, paling tidak untuk Kemenko PMK mempunyai tanggung jawab pada tujuan Program Raskin dalam hal "Membantu Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Mengurangi Beban pengeluaran RTS, dimana dengan diberikan Raskin, maka RTS berkurang beban pengeluarannya untuk membeli pangan beras, sebanyak 39,5%". Karena hal ini adalah merupakan *Social Protection*. *Social Protection* ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: *social assistant*, yakni bantuan dalam bentuk tunai (cash transfer) dan bantuan dalam bentuk natura (*in kind*); dan *social security*. Program Raskin ini termasuk dalam *social assistant in kind*. Di negara manapun *social assistant* semacam Raskin ini selalu ada. Jadi Kemenko Kesra atau PMK mempunyai tanggung jawab dan sangat *concern* terhadap Program *Social Protection*. Untuk hal lain seperti stabilisasi harga, pengendalian gejolak inflasi dll, lebih di bawah Koordinasi Kemenko Perekonomian.

Penyaluran RASKIN (Beras untuk Rumah Tangga Miskin) sudah dimulai sejak 1998. Krisis moneter tahun 1998 merupakan awal pelaksanaan RASKIN yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin. Pada awalnya disebut program Operasi Pasar Khusus (OPK), kemudian diubah menjadi RASKIN mulai tahun 2002, RASKIN diperluas fungsinya tidak lagi menjadi program darurat (*social safety net*) melainkan sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat. Melalui sebuah kajian ilmiah, penamaan RASKIN menjadi nama program diharapkan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Alasan pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keadaan bahwa Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat banyak ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan pendistribusian raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan. Penelitian lapangan dilaksanakan selama 3 (bulan) bulan yaitu Oktober s/d Desember 2017

3.2. Bentuk Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang efektivitas program raskin Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

Metode kualitatif secara garis besar dibedakan dalam dua macam, yaitu kualitatif interaktif dan kualitatif non interaktif. Metode kualitatif interaktif merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya. Peneliti menginterpretasikan fenomena-fenomena bagaimana orang mencari makna daripadanya. Penelitian non interaktif (*non interaktif inquiry*) disebut juga penelitian analisis, mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti menghimpun, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diamati.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini digunakan metode gabungan antara kualitatif interaktif dan noninteraktif. Sesuai dengan namanya penelitian ini menghimpun data secara interaktif atau melalui interaksi dengan sumber data yang adalah PerangkatKelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, dan sumber data non interaktif adalah dokumen-dokumen berupa Peraturan Daerah yang terkait dengan kebijakan Raskin Di Kabupaten Asahan.

3.3. Variabel Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu

variabel atau variabel tunggal, yaitu efektivitas program raskin Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

- a. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan key informan (informan kunci). Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah : Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat. Sedangkan sebagai informan tambahannya adalah : perangkat kelurahan, panitia penyaluran raskin, dan masyarakat penerima raskin, secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti.
- b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam pelaksanaan program raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan.

3.5. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang

diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 1) Pelaksanaan Program Raskin di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) Program Raskin. Pemberian bantuan raskin kepada masyarakat di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat memberikan manfaat kepada masyarakat salah satunya adalah membantu tingkat ekonomi masyarakat.
- 2) Efektivitas pengelolaan beras untuk rumah tangga miskin (Program Raskin) di Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat adalah proses pelaksanaan program Raskin dilihat dari aspek efektivitasnya, yaitu ukuran keberhasilan pelaksanaan program Raskin 6T, yang meliputi : tepat sasaran penerima manfaat, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu dan tepat administrasi dan tepat kualitas. Secara umum adalah belum efektif, karena masih ditemukan penerima Program Raskin yang tidak tepat sasaran, tidak tepat harga, tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu.

5.2. Saran

Hasil-hasil temuan dalam penelitian ini perlu ditindak lanjuti melalui beberapa saran sebagai berikut :

- a) Untuk mengoptimalkan efektivitas pengelolaan program Raskin, khususnya dititik distribusi, maka disarankan agar Tim Pelaksana dan pemerintah kelurahan memperbaiki sistem pengelolaannya, terutama berkaitan dengan ketetapan kelompok sasaran RTM penerima manfaat program agar dapat terlayani secara keseluruhan sesuai dengan jumlah RTM, ketepatan pendistribusian beras ke RTM berkaitan dengan komunikasi dengan Kepala Lingkungan.
- b) Mengingat program Raskin memiliki dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan RTM, maka diharapkan agar program ini terus dilaksanakan secara kontinu/berkelanjutan dengan terus-menerus memperbaiki manajemen pendistribusiannya sehingga dapat menjangkau seluruh RTM yang ada dititik distribusi (desa).

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson. J, 2004, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Kencana Perdana.
- Anggara. Sahya, 2014. *Kebijakan Publik*, Bandung: Pustakan Setia.
- Ayu. 2002, *Implementasi kebijakan program raskin di desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan*. UMRAJ, Tanjung Pinang
- Bank Dunia. 2000. *Indonesia: Strategi Pengurangan Angka Kemiskinan Berkesinambungan*. Studi Negara Bank Dunia. Washington: The World Bank.
- BPS (Badan Pusat Statistik). 2016. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara*.
- Bourguignon, Francois. 2004. *The Poverty–Growth Inequality Triangle*. Paper The World Bank.
- Dwiyanto, Agus, dkk., 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Damanik, Robert F. “Analisis Efektifitas iDistribusi Raskin: Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan.” *Jurnal USU*.
- Hatta, Mohammad. 1976. *Kumpulan Karangan (I)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hastuti, Bambang Sulaksono, Sulton Mawardi, 2018. Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Raskin dalam Mencapai Enam Tepat . <http://smeru.or.id/sites/default/files/publication/raskinmencapaienamtepat.pdf>
- Hessel, Nogi S. 2000. *Analisis Kebijakan Publik Kontemporer*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. *Pedoman Umum Raskin 2016*. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan *Pedoman Umum (PEDUM) Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2016* yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Perum BULOG Pusat Khaeron,
- Herman. *Politik Ekonomi Pangan: Menggapai Kemandirian Mewujudkan Kesejahteraan*. Jakarta: Cidesindo, 2012.
- Korten, David C. “Community Organization and Rural Development A Learning Process Approach.” *Public Administration Review : Vol:40, No 5 Sept-Oct*, 1980.
- Lauer, P.H., 2004, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.

- L.P, Sinambela. 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahmudi. Ahmad, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat*, Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Sebelas Maret.
- MD, Mahfud. 2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moenir, HAS. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Monteiro, Josef Mario. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Moleong, J Lexy. 2001, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Musawa, Mariyam. 2009, *Studi Implementasi Program Raskin di Kelurahan Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang*. Thesis,UNDIP Semarang
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Nasution, S. 2009. *Metode research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- N. Dunn, William. *Public Policy Analisis: An Introduction*. London: Prentice-Hall Inc.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugraha, Aprilia Theresia dan Prima. *pembangunan berbasis masyarakat* . Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tempo, 2017. Maret 2017, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Capai 27,77 Juta. <https://bisnis.tempo.co/read/892130/maret-2017-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-capai-2777-juta>
- Osborne, David & Ted Gaebler, 1997, *Mewirusahaakan Birokrasi*. Jakarta: PPM.
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Pratikno, dkk. 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*. Yogyakarta: S2 PLOD UGM bekerjasama dengan DEPDAGRI.
- Raya Aswardi. 2014, *Implementasi Raskin di Kecamatan Ternate Riantang Kabupaten Bone*. UNHAS, Makasar
- Rahayu, Sri Kusumastuti. *Program RASKIN: Upaya Peningkatan Tepat Sasaran dan Jumlah Beras yang diterima RTS PM Dalam rangka Penanggulangan Kemiskinan*. Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan : ISEI, Jakarta.

Reece Michell. 1989, Efektivitas. Jakarta: Erlangga

Senuk, Muamil Sun'an dan Abdrrahman. *Ekoomi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.

Smeru, 2015. *Efektivitas Pelaksanaan Raskin*. Hasil Penelitian.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

<http://www.hetanews.com/article/84725/pendistribusian-rasta-di-asahan-kembali-terlambat>, diakses tanggal 16 Maret 2017.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1**Daftar Penerima Raskin/Rasta Tahun 2016 di Kelurahan Baru Kec. Kota Kisaran Barat Tahun 2016.**

No	Nama	Alamat
1	A Han	Jl. H. Misbah Gg. Asia LK. I
2	Fong Keng Koen	Jl. H. Misbah Gg. Asia LK. I
3	Basiruddin Jambak	Jl. H. Misbah Gg. Asia LK. I
4	Asni Sriwardani	Jl. Hamka LK. II
5	Ruslah	Jl. Hamka Gg.Senangin LK. II
6	Abd. Majid Nst	Jl. Hamka LK. II
7	Yamini	Jl. Hamka Gg.Senangin LK. II
8	Liza	Jl. Hamka Gg.Senangin LK. II
9	Husin	Jl. Wahidin Lk. III
10	Zaharuddin Panjaitan	Gg. H. Ahmad Saleh LK. III
11	Yuniar Yusuf	Gg. Alwasliyah LK. III
12	Suryono	Jl. Masmansur Gg.Kelinci Lk. III
13	Azizman	Jl. Masmansur Gg.Kelinci Lk. III
13	Lindung Marpaung	Jl. Masmansur Gg.Kelinci Lk. III
14	Nani S	Jl. Masmansur Gg.Kancil Lk. III
15	Irvan Erlambang	Jl. Masmansur Gg.Kancil Lk. III
16	Mangitar Siagian	Jl. Diponegoro Blk Lk. III
17	Iswanto	Jl.Wahidin Gg. Kancil Lk. III
18	Rosdiana	Jl. Masmansur Gg.Kelinci Lk. III
19	Butet	Jl.Diponegoro Blk Lk. III
20	Maimunah	Jl.Wahidin Gg. A.Saleh Lk. III
21	Asniwati	Jl. Masmansur Gg.Kelinci Lk. III
22	Salbiah	Jl.Wahidin Gg. A.Saleh Lk. III
23	Siti Asni	Jl.Wahidin Gg. A.Saleh Lk. III
24	Halimah	Jl. Masmansur Lk. III
25	Nazir Ali	Jl. Masmansur Gg. Kancil Lk. III
26	Sofyani	Gg.Alwasliyah Lk. III
27	Susi	Gg.Alwasliyah Lk. III
28	Atrizal	Gg.Alwasliyah Lk. III
29	Samsudin	Jl.Wahidin Lk. III
30	Lisnawati	Jl.Wahidin Lk. III
31	Hasnah Nst	Jl.Wahidin Lk. III
32	Erlina	Gg.Kelinci Lk. III
33	Ely Sugianto	Gg.Kancil Lk. III
34	Wati Karo Karo	Gg.Kancil Lk. III
35	Rubiyem	Jl. Dipo Gg Cempaka LK. IV
36	Irwan Siregar	Jl. Dipo Gg Cempaka LK. IV
37	Zulkarnain Lubis	Jl. Dipo Gg. Cempaka LK. IV
38	Iswan Siregar	Gg.Cempaka Lk. IV
39	Khadijah	Gg.Cempaka Lk. IV

40	Sudarsih	Gg.Cempaka Lk. IV
41	Rusmini	Jl. Mangunsarkoro Lk. IV
42	Hamidah Hsb	Jl. Mangunsarkoro Lk. IV
43	M. Samin Pasaribu	Jl. Waja LK. IV
44	Darmawati	Belakang Musholla Lk. IV
45	Mean	Belakang Musholla Lk. IV
46	Listeria Situmorang	Belakang Musholla Lk. IV
47	Lukman Hakim	Belakang Musholla Lk. IV
48	Wirna Willis	Jl. Mangunsarkoro Lk. IV
49	Herman Sitorus	Jl. Mangunsarkoro Gg. Ros Lk. IV
50	Lasiem	Jl.Waja Lk. IV
51	Nuraini	Jl.Waja Lk. IV
52	Amat Lubis	Jl. Karetini Lk. IV
53	Rahmat S	Jl. M.Ibrahim Gg. Rahmat Lk. VII
54	Nurhaida BYT	Jl. Cokro Gg. Mawar Lk. IV
55	Masdizal Awang	Jl.Waja Lk. IV
56	T. Sahrul	Gg. Cempaka Lk. IV
57	Nurhaida Nawir	Gg. Cempaka Lk. IV
58	Mhd. Arman	Blk. Mushola Lk. IV
59	Paiman	Blk. Mushola Lk. IV
60	Rusli Lubis	Blk. Mushola Lk. IV
61	Jenab	Jl. Mangunsarkoro Lk. IV
62	Tirta Budi	Jl. Ch. Anwar LK. V
63	Eddy	Jl. Dipo Gg. Perak LK. V
64	Gunawan	Jl. Ch. Anwar Gg. Emas Lk. V
65	Misiati	Jl. Kartini Gg. Emas Lk. V
66	Elly	Jl. Kartini Gg. Emas Lk. V
67	Abdul Mutholib	Jl. Anwar No. 25 Lk. V
68	Ginah	Jl. Ir. Sutami Lk. VII
69	Latifah	Jl. Malik Gg. Baharu Lk. VII
70	Siti Khadijah	Jl. Malik Gg. Buntu Lk. VII
71	Mariani	Jl. A.Yani Gg.Baharu LK. VII
72	Khairul	Jl. Malik Gg. Buntu Lk. VII
73	Muharni	Jl. Malik Gg. Buntu Lk. VII
74	Sukriono	Jl. Malik Gg. Buntu Lk. VII
75	Ngatiman KS	Jl. Cokro Gg. Kurnia Lk. VII
76	Juraidah	Jl. Cokro Gg. Kurnia Lk. VII
77	Nasib	Jl. Malik Gg. Buntu Lk. VII
78	Erni	Jl. Malik Gg. Rahmad Lk. VII
79	Siti Sofiah	Jl. Cokro Gg. Kurnia Lk. VII
80	Samsul PLN	Jl. Malik Gg. Baharu Lk. VII
81	Fajar	Jl. Cokro Gg. Kurnia Lk. VII
82	Samsir	Jl. Malik Gg.Baharu Lk. VII
83	Kaliyem	Jl. A. Yani Gg. Baharu. Lk. VII
84	Adi Sukma	Jl. Malik Gg. Buntu Lk. VII
85	Kimsin	Jl. H. Misbah Gg. Asia LK. I

86	Khairuddin	Jl. Wahidin Gg.A.Saleh LK.III
87	Masrizal	Jl. Wahidin Gg.A.Saleh LK.III
88	Heri Suprianta Lubis	Jl. Waja LK. IV
89	M. Sarno	Jl. Dipo Gg. Perak LK. V
90	Endang Indrayanto	Jl. M.Ibrahim Gg.Jeruk Lk.VI
91	Mastur	Jl. Dipo Gg. Pisang LK. VI
92	Sarwan	Jl. M.Ibrahim Gg.Jeruk Lk.VI
93	Irdani	Jl.A.Yani Gg. Baharu LK. VII
94	Nursiah Sinaga	Jl. Mas mansyur Lk. I
95	Sawito	Jl. Dipo Gg. Durian Lk. VI

LAMPIRAN 2

Data Masyarakat Penerima Raskin/Rasta Tahun 2017 di Kelurahan Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Tahun 2017

No	Nama	Alamat
1	Bob Efendi	Jalan Diponegoro NO.336 LK V
2	Rubun Tambunan	JL Diponegoro Gg Nenas LK. VI
3	Zulfan hasibuan	JL Diponegoro Kilang Padi LK. IV
4	Bustami	JL Mangunsarkoro LK. IV
5	Eeng supriatna	JL Cokro Aminoto Gg Durian LK. VI
6	Masja Sitepu	Jalan wahidin Gg A Saleh NO.20 A LK III
7	Supriono	JL Malikibrahim LK. VII
8	Fery handoko	Jalan Malik Ibrahim GG Buntu LK VII
9	Bachtiar lubis	JL Dipo Gg Cempaka LK. IV
10	Ahmad oloan	Jalan Kratini Gg EMAS LK. V
11	Samsudin damanik	JL Diponegoro Komplek KILA LK. IV
12	nurhaidah	JL Dipo Gg Cempaka LK. IV
13	Wahyudi	Jalan Anwar Gg Mangga LK. VI
13	Sanimin	JL Diponegoro GG DUKU LK. VI
14	Endi sugiaro	Jalan Charil Anwar NO.21 LK.V
15	Juri	JL M Ibrahim Gg Rahmat LK. VII
16	mukhtar	JL Diponegoro GG PISANG LK. VI
17	BENI surahman	Jalan Mas Mansyur NO.44 LK III
18	Dermawan	Jalan Mangunsarkoro LK IV
19	Hendra musa simanj	JL Mansmansur Gg Keluarga LK.IV
20	Riswanto	Jalan Cokroaminoto GG Kurnia LK. VII
21	Suhaidir asri	JL diponegoro Gg Logam LK. V
22	Suwarsono	JL Malik Ibrahim Gg Jeruk LK. VI
23	Musa abdu rahman s	JL Cokroaminoto Gg Cempaka LK. IV
24	Rubiyem	JL Dipo GG Cempaka LK. IV
25	Andi darma	Jalan Chairil Anwar LK V

26	Ramadhani	Jalan M Ibrahim GG Buntu LK VII
27	Herianto	JL Charil Anwar LK. V
28	Ilham situmorang	Jalan Diponegoro Gg Buntu LK VII
29	Samsidar	JL.Cokroaminoto Gg.Kurnia VII
30	Sakdiah daulay	JL Diponegoro Gg Nenas LK. VI
31	Edi nurmawan	Jalan Chairil Anwar NO.49 LK V
32	Suheri	Jalan Wahidin Gg Al Wasliyah LK III
33	Zulham panjaitan	Jlirsutami LK. VII
34	M kohir	JL. Chairil Anwar LK. V
35	Idris	Jalan M Ibrahim Gg Rahmat N0.4 LK. VII
36	Syahrul	jalan anwar gg duku lk.Vi
37	Mhd rifai saragih	jalan diponegoro gg.perak lk. V
38	Syahrul tanjung	jalan mangunsankoro LK IV
39	Wahid	JL diponegoro gg nenas LK. Vi
40	Syahrian	jl diponegoro gg angka lk. Vi
41	Hendrik kurniawansyah	jalan chairil anwar gg. perak lk V
42	Sukiman	JL malik Ibrahim LK. VI
43	Juliandi surya saputra	Jalan diponegoro gg.nangka lk. VI
44	M. daud siregar	JL wahidin GG A SALEH LK. III
45	Muhammad syawal	jalan diponegoro GG. langsung LK VI
46	Sugianto	JL chairil anwar GG emas LK. V
47	Anwar lubis	JL mangunsarkoro LK. IV
48	Hendra	jalan diponegoro GG.nangka LK VI
49	Junaidi	JL Mangun Sarkoro LK. IV
50	Buriem	JL Diponegoro GG Nenas LK. VI
51	Ilham harahap	JL Diponegoro GG Perak LK.V
52	Marhan srg	Jalan Diponegoro GG.Buntu LK VII
53	Nurdin	JL Diponegoro GG Nangka LK. VI
54	Rajali nst	Jalan Malik Ibrahim Gg.Rahmad LK VII
55	Sutiono	Jalan Chairil Anwar LK VI
56	Hasan sitorus	JL Malik Ibrahim Gg Buntu VII
57	Kaharuddin pasarib	JL Waja LK. IV
58	Sukiman manurung	Jalan Hamka NO 43 LK II
59	Bachtiar batubara	JL. Waja LK. IV
60	Pardi	Jalan Malik Ibrahim Gg Jeruk LK. VI
61	Hamidah hasibuan	JL Mangunsarkoro Gg Ros3 LK. IV
62	Bambang suwito	Jalan mas mansyur gg kelinci lk III
63	thamrin	JL Hamka LK. II
64	Iswan siregar	JL mangunsarkoro LK. IV
65	Eti apridah	JL Anwar GG Mangga LK. VI
66	Chairul anwar nasu	Jalan Mangun Sarkoro LK IV
67	Ahmad zaini pohan	JL Diponegoro LK. I
68	Heri kuswanto	JL Ayani Ggbaharu LK. VII
69	Abd haris	JL Diponegoro Gg Perak LK.V

70	Samsir	Lingkungan VII
71	Zulkarnain lubis	JL. Mangunsarkoro LK. IV
72	Despin yusli pohan	jalan diponegoro NO.236 LK. I
73	Juledi harahap	JL. hamka Gg. senangin LK. II
74	Santi	lingkungan VII
75	Andika harahap	lingkungan VII
76	Bustari	lingkungan V
77	M. mastur	Jalan Khairil Anwar No.16 B LK. VI
78	Hasmik	JL Diponegoro Gg Pisang LK. VI
79	Latifah	JL M Ibrahim Gg Baharu LK. VII
80	Suriani	Jlan. Kharil Anwar No.17 B.LK.VI



MODEL DPM -1

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT
PROGRAM RASKIN/RASTRA TAHUN 2016**

PROVINSI :

KABUPATEN/KOTA :

KECAMATAN :

KELURAHAN/DESA :

No.	Nama Kepala Rumah Tangga (KRT)	Nama Pasangan KRT	Nama Anggota Lain Rumah Tangga	Alamat Lengkap
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
Dst				
JUMLAH				

..... 2016

Mengetahui/Disahkan
Camat,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

Ditetapkan
Kepala Desa/Lurah,

(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

No.	Nama	Alamat Lengkap	Jumlah (Kg)	Harga (Rp) *)	Tanda Tangan RTS-PM
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
Dst					
JUMLAH					

*) Harga yang dibayarkan oleh RTS-PM

..... 2016

<p>Mengetahui/Disahkan Kepala Desa/Lurah, (Tanda Tangan dan Stempel)</p>	<p>Titik Distribusi Ketua Pelaksana Distribusi, (Tanda Tangan)</p>
---	---

CONTOH BERITA ACARA MUEDES/MUSKEL

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN

Desa/Kelurahan : _____ Kabupaten/Kota : _____
 Kecamatan : _____ Provinsi : _____

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota Nomor tanggal 2016, tentang Penetapan Pagu Raskin/Rastra tahun 2016, maka masyarakat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi menyelenggarakan Musyawarah Desa/Kelurahan, pada:

Hari :
 Tanggal :

Dengan peserta sebagai berikut:

1. Aparat Desa Orang
2. Perwakilan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat Orang
3. Perwakilan RTS-PM Raskin/Rastra 2016 Orang

Dengan kesepakatan sebagai berikut:

Menyatakan terjadi perubahan DPM dengan rincian sebagai berikut ini:

1. Jumlah RTS-PM dalam DPM Rumah Tangga
2. Jumlah RTS-PM yang diganti karena	
a. Pindah (keluar dari desa/kelurahan) Rumah Tangga
b. Seluruh anggota rumah tangga meninggal (tanpa ahli waris) Rumah Tangga
c. Rumah tangga tercatat dua kali dalam DPM awal Rumah Tangga
d. Rumah tangga dianggap sudah mampu Rumah Tangga
3. Jumlah Rumah Tangga pengganti (2a+2b+2c+2d) adalah Rumah Tangga

dan menyatakan bahwa jumlah Rumah Tangga yang diganti adalah sama dengan jumlah Rumah Tangga pengganti.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2016
 (Tempat) (Tanggal)

Kepala Desa/Lurah, Tanda Tangan & Stempel (.....) Nama Jelas	Ketua BPD/Dekel, Tanda Tangan & Stempel (.....) Nama Jelas	Perwakilan Tokoh Agama/Masyarakat, Tanda Tangan (.....) Nama Jelas
Perwakilan RTS-PM, Tanda Tangan (.....) Nama Jelas	Perwakilan RTS-PM, Tanda Tangan (.....) Nama Jelas	Perwakilan RTS-PM, Tanda Tangan (.....) Nama Jelas

CONTOH BERITA ACARA MUSCAM

BERITA ACARA MUSYAWARAH KECAMATAN

Berdasarkan Surat Bupati/Walikota, Nomor:, tanggal 2016, tentang Penetapan Pagu Raskin/Rastra tahun 2016, maka pada hari ini:, tanggal, bulan, tahun dua ribu, kami para Kepala Desa/Lurah di Kecamatan Kabupaten/Kota, Provinsi, telah mengadakan Musyawarah dengan kesepakatan sebagai berikut:

No	Nama Desa/Kelurahan	RTS – PM		Keterangan
		Awal	Hasil Muscam	
1				
2				
3				
dsL				
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2016

Kepala Desa/Lurah,
(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah,
(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah,
(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama Jelas)

Kepala Desa/Lurah,
(Tanda Tangan dan Stempel)
(Nama Jelas)

Disahkan oleh:
Camat,
(Tanda Tangan dan Stempel)

(Nama Jelas)

FORMULIR REKAPITULASI PENGGANTI (FRP) 2016 RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM 1)

Provinsi : _____ Kabupaten/Kota : _____ Kecamatan : _____ Kelurahan/Desa : _____

No. Urut	RUMAH TANGGA YANG DITANGGUNI (RESEM DPM 2016)							RUMAH TANGGA PERGGANTI				Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	JALAN DEWALAPANE DEPT. LUBUK TILUANG KABUPATEN PASIR KALIA KOTA PASIR KALIA							PERUMAH MANAJEMEN					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK	NO. SURAT PERALIHAN HAK MILIK
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Kabupaten Pasir Kalia, tanggal 2016

Ditandatangani
Kepala Desa/Lurah,
(.....)

Ditandatangani
Kepala Desa/Lurah,
(.....)

Formulir ini dapat dipertanyakan.

MODEL BAST
BERITA ACARA SERAH TERIMA BERAS RASKIN/RASTRA NOMOR:
<p>Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota No.:, tanggal, dan SPPB/DO No.: pada hari ini:, tanggal, bulan, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>
<p>1. Nama : Jabatan : Satker Raskin/Rastra Perum BULOG Divre/Subdivre/Kansilog</p> <p style="text-align: center;">selanjutnya disebut PIHAK I.</p>
<p>2. Nama : Jabatan : Pelaksana Distribusi Raskin/Rastra Desa/Kelurahan *)</p> <p style="text-align: center;">selanjutnya disebut PIHAK II.</p>
<p>PIHAK I telah menyerahkan Beras Raskin/Rastra di TD untuk alokasi bulan sebanyak Kg., untuk RTS-PM, dan PIHAK II telah menerima beras Raskin/Rastra di TD sesuai ketentuan yang berlaku, sebanyak tersebut di atas dalam kondisi baik.</p> <p>Penyerahan beras sampai kepada RTS-PM menjadi tanggungjawab PIHAK II.</p> <p>Demikian Berita Acara Serah Terima Raskin/Rastra dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>
<p style="text-align: center;">PIHAK II, PIHAK I,</p> <p style="text-align: center;">(Tanda Tangan) (Tanda Tangan)</p> <p style="text-align: center;">(Nama Jelas) (Nama Jelas)</p>
<p>Catatan:</p> <p>*) Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan Setingkat atau Pejabat Struktural di desa/ kelurahan setempat. Bila di luar dari pejabat tersebut perlu penunjukan/penetapan dari Kades/Lurah/Kepala Pemerintahan setingkat.</p>

MODEL MBA-1

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA
PELAKSANAAN PENYALURAN RASKIN/RASTRA**

KABUPATEN/KOTA :

ALOKASI BULAN :

DISALURKAN BULAN : 2016

Berdasarkan Rekapitulasi Berita Acara serah Terima Pelaksanaan Penyaluran Beras Raskin/Rastra di kecamatan untuk alokasi bulan 2016, telah disalurkan beras sebanyak Kg untuk RTS-PM, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah RTS-PM	Kuantum (Kg)	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
.....						
.....						
Jumlah						

..... 2016

BUPATI/ WALIKOTA *)

(Tanda Tangan & Stempel)

.....

(Nama Jelas)

DIVRE/SUBDIVRE/KANSILOG

KEPALA,

(Tanda Tangan & Stempel)

.....

(Nama Jelas)

Catatan:
*) = atau pejabat yang mewakili atau ditunjuk.

**BERITA ACARA
PENGECEKAN BERAS RASKIN/RASTRA**

Pada hari ini, tanggal Berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) Bupati/Walikota
..... No., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama :
Jabatan :¹⁾

selanjutnya disebut **PIHAK I**,

2 Nama :
Jabatan :²⁾

selanjutnya disebut **PIHAK II**,

3 Nama :
Jabatan : Kepala Gudang

selanjutnya disebut **PIHAK III**.

Dengan ini secara bersama-sama telah melaksanakan pengecekan kualitas dan kuantitas beras Raskin/Rastra untuk alokasi bulan tahun Kabupaten/Kota secara visual dan berdasarkan Laporan Kondisi Kualitas di Gudang Perum BULOG, bahwa kondisi kualitas baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2016

PIHAK III,
(Tanda Tangan)

(Nama Terang)

PIHAK II,
(Tanda Tangan)

(Nama Terang)

PIHAK I,
(Tanda Tangan)

(Nama Terang)

Keterangan:

- 1) Perwakilan Tim Koordinasi (Tikor) Raskin/Rastra Kabupaten/Kota.
- 2) Satker Raskin/Rastra Perum BULOG.